

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI PEMILU 2024

Heru Dian Setiawan^{1*}, TB. Massa Djafar²

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email : herudiansetiawan@civitas.unas.ac.id, tbmassadjafard@yahoo.com

*Korespondensi: herudiansetiawan@civitas.unas.ac.id

(Submission 31-10-2023, Revisions 04-12-2023, Accepted 13-12-2023)

Abstract

In the 2024 Election, Gen Z and Gen Y will be the group of young voters who will account for 53-55% of the total number of voters. In the last two periods, the increase in participation of young voters suggests that they are being recruited just to get votes. On the other hand, there is also the impression that the increase in the number of young voters is accompanied by political awareness which can be interpreted as the level of concern that young voters still maintain regarding the current government or political system. This research aims to determine the participation of young voters in welcoming the 2024 Elections, especially the context of voting behavior. Based on research results, young voters' participation in elections can still be interpreted as a form of political awareness or the level of trust young voters maintain in the current government or political system. Today's young voters are also more rational and critical about Indonesia's future leaders. The ability of young voters to adapt to modernization requires leaders who can adapt to their generation.

Keywords: participation, politics, young voter, 2024 election, Indonesia.

Abstrak

Pada Pemilu 2024, Gen Z dan Gen Y akan menjadi kelompok pemilih muda yang jumlahnya mencapai 53-55% dari total jumlah pemilih. Dalam dua periode terakhir, peningkatan partisipasi pemilih muda mengesankan bahwa mereka dirangkul hanya untuk mendapatkan suara. Di sisi lain, ada pula kesan bahwa peningkatan jumlah pemilih muda diikuti oleh kesadaran politik yang bisa dimaknai sebagai masih terjaganya tingkat kepedulian pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pemilih muda dalam menyambut Pemilu 2024 terutama konteks perilaku pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi pemilih muda dalam Pemilu tetap dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran politik atau masih terjaganya tingkat kepercayaan pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung. Pemilih muda saat ini juga lebih rasional dan kritis tentang pemimpin masa depan Indonesia. Kemampuan pemilih muda untuk beradaptasi dengan modernisasi membutuhkan pemimpin yang dapat menyesuaikan dengan generasinya.

Kata Kunci: partisipasi, politik, pemilih muda, pemilu 2024, Indonesia.

PENDAHULUAN

Populasi dunia yang terus berkembang menciptakan beberapa generasi. Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini mengelompokkan populasi Indonesia dalam enam generasi, yaitu post generasi Z atau *Generasi Alpha* (kelahiran tahun 2013-2025), generasi Z atau *Gen Z* (kelahiran tahun 1997-2012), generasi milenial atau *Gen Y* (kelahiran tahun 1981-1996), generasi X atau *Gen X* (kelahiran tahun 1965-1980), generasi *baby boomer* (kelahiran tahun 1946-1964), dan *pre-boomer* (Codrington & Grant-Marshall, 2004). Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia tahun 2024, *Gen Z* yang akan berusia 12-27 tahun jumlahnya mencapai sekitar 75,94 juta orang atau 27,95%. Sedangkan *Gen Y* yang berusia 28-43 tahun mencapai sekitar 69,38 juta jiwa atau 28,87%. Kedua generasi ini merupakan kelompok pemilih muda (berusia 17-40 tahun) yang mencapai sekitar 107 juta jiwa atau sekitar 53-55% dari total pemilih, yang menurut Daftar Pemilih Sementara (DPS) jumlahnya sebanyak 205.853.518 pemilih (BPS, 2022).

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Partisipasi politik menjadi fondasi praktik demokrasi perwakilan elektoral. Pemilu dan partisipasi pemilih merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Di sini, demokrasi bisa dipahami suatu pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Demokrasi dalam pendekatan normatif menekankan pada ide dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi dalam pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai rangkaian prosedur mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga perwakilan (Gaffar, 1999; dan Surbakti, 2010). Karena itu, pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilu yang dilakukan secara sistematis dan berkala.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, yang diwarnai oleh permasalahan menyatukan pemikiran dari beraneka ragam masyarakat serta berusaha untuk menghapus sistem kediktatoran yang ada. Bukan hal yang mudah untuk dapat menyatukan masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi dengan semangat UUD 1945 dan perjuangan para pendiri bangsa, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Indonesia mampu mengaktualisasi demokrasi di Indonesia dengan dilaksanakannya pemilu pertama kali tahun 1955. Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cita-cita dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia yang diwujudkan dengan lahirnya partai politik yang kemudian berkompetisi dalam “Pesta Demokrasi”. Sebagaimana dirumuskan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah: “Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Menurutny, inilah yang terbaik dan yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di muka bumi ini.

Dalam konteks Indonesia, menurut Kleden, setelah berlangsungnya pemilu 2004, negara ini baru dianggap berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjadi negara demokratis ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India (Kleden, 2005). Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998 (Hendrik, 2010).

Pada pemilu 2024, pemilih milenial adalah pemilih yang terbanyak dengan jumlah mencapai sekitar 53-55%. Hasil survei *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) menunjukkan bahwa persentase partisipasi pemilih muda di Indonesia meningkat dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mencapai sekitar 81%, meningkat sekitar 10% dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 70% (Kompas, 2019). Sedangkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu 2019 mencapai sekitar 91,3%, meningkat sekitar 5,4% dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 85,9% (Kompas dan Kumparan, 2023).

Perilaku pemilih muda memiliki pengaruh terhadap terpilihnya presiden dan wakil presiden (Bariguna et.al., 2021) karena potensi pemilih muda (berusia 17-40 tahun) akan mendominasi dan bisa menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. Kajian ini dinilai penting karena partisipasi politik pemilih muda bisa dimaknai sebagai masih terjaganya tingkat kepercayaan (kepedulian) pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung di tengah perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi Covid-19, yang telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan.

Van Elsas et.al. (2016) menyatakan, jika tidak menghadirkan proses demokrasi yang baik, maka akan ditinggalkan oleh para pelaku demokrasi. Di sisi lain, menurut Shoa dan Gizaw (2021) bahwa pemilih muda sekarang ini lebih akrab dengan media sosial sehingga dapat memberikan pengaruh informasi performa calon. Media sosial ini, terkadang mempengaruhi perilaku dan dinamika pemilih muda dalam menentukan pilihannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ilmiah untuk memahami fenomena sosial secara alamiah. Metode penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dengan melakukan pengumpulan data melalui bahan bacaan yang relevan seperti buku atau artikel. Menurut J. Ahmad (2018), sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur review dengan menghimpun referensi yang bersumber pada buku maupun jurnal yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan kontekstual, yang kemudian dideskripsikan secara lebih detail dan mendalam sesuai dengan yang terjadi, terutama terkait partisipasi politik pemilih muda dalam menyambut Pemilu 2024.

PEMBAHASAN

• Konsep Demokrasi

Banyak macam istilah tentang demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, ada pula demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Jadi, demokrasi bisa berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Sesudah Perang Dunia II, ada gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.

Penelitian UNESCO menyebutkan bahwa: “*Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*” (Benn and Peters, 1964). Ini dapat diartikan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi merupakan nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang berpengaruh. Namun demikian, ide demokrasi ini juga dianggap *ambiguous* atau mempunyai pengertian ambigu, sekurang-kurangnya ada ketidakpastian (*ambiguity*) mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara apa yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi itu sendiri.

Dari sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, terdapat dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi ini mula-mula berasal dari Eropa. Tetapi sesudah Perang Dunia II, kedua aliran ini mulai didukung oleh beberapa negara baru di Asia seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. Negara-negara ini mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup yang diterapkan di negara-negara tersebut. Demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tunduk kepada *Rule of Law*. Sementara di lain pihak, terdapat pula negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara, dan sebagainya, yang mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*Machsstaat*), dan yang bersifat totaliter (Budiardjo, 2008).

Demokrasi merupakan sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini, baik di negara-negara kapitalis maupun komunis, maju maupun berkembang, Timur maupun Barat, Utara maupun Selatan, yang enggan mencantumkan, baik eksplisit maupun implisit, kata ‘demokrasi’ pada sistem politik yang dianut negaranya. Meskipun demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal, namun tidak ada satu pun sistem demokrasi yang bisa berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Secara istilah mungkin sama, akan tetapi isi dan cara perwujudannya bisa berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah (Lipson, 1964). Beberapa peristiwa dunia akhir-akhir ini, ditandai dengan maraknya gerakan massa yang menuntut perubahan mendasar terhadap struktur politik dan ketatanegaraan, selain menuntut perbaikan

sosial-ekonomi. Itu semua oleh pengamat disebut sebagai gelombang transisi menuju demokrasi dalam skala dunia.

Runtuhnya tembok Berlin, gerakan pro-demokrasi di Hongaria/Cekoslowakia, termasuk di belahan negara sosialis seperti Eropa Timur, Cina, Vietnam, dan Nikaragua, Yugoslavia merupakan bukti atas gerakan itu. Di Eropa Timur muncul aksi-aksi protes bercorak rasial seperti di Jerman dan Perancis; gejolak konflik etnis, dan agama seperti di Cekoslowakia dan Indonesia, termasuk di bekas Yugoslavia dan bekas Uni Sofyet; munculnya kembali aspirasi komunis seperti di Polandia dan Rusia. Di Cina juga muncul hambatan internal berupa pembantaian berdarah di lapangan Tiananmen. Sehingga, sejak awal dasa warsa delapan puluhan, di negara-negara itu dapat dikatakan tidak mengenal gerakan politik tanpa istilah “desakan rakyat”. Meskipun peristiwa ini tidak diharapkan, tetapi hal ini dianggap oleh Francis Fukuyama sebagai proses yang sangat menjanjikan terhadap proses demokrasi.

Proses itu dianggap sebagai proses menuju *the end of history*, yang berwujud kemenangan kapitalisme, dan demokrasi liberal di seluruh bumi. Fukuyama (1992) yakin bahwa proses sejarah demokrasi di dunia dapat diprediksi berjalan secara linier utopis, dan seluruh dunia akan menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik, dengan demikian *the end of history* akan terlaksana.

Hambatan demokratisasi pernah ditemui di negara Amerika Latin, Afrika dan Asia. Di Asia, seperti di Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Kasus yang lebih tragis terjadi di Aljazair, Irak Libia Somalia, El-Salvador, Guatemala, Paraguay, Myanmar, Korea Utara, di mana demokrasi telah hilang dari kehidupan politik negara itu, sehingga negara-negara tersebut berubah menjadi negara yang otoriter-diktator. Menurut *Freedom House*, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 negara pada tahun 1972). Menurut *World Forum on Democracy*, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2% penduduk dunia.

Melihat uraian di atas, menurut penulis, mengimplementasikan gagasan pokok atau gagasan dasar suatu demokrasi yang modern adalah pekerjaan yang berat. Merujuk pada pemikiran Dahl (1992), bahwa salah satu akibat dari dipindahkannya gagasan demokrasi dari Negara-Kota ke Negara-Nasional adalah kemungkinan bagi warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dalam keputusan bersama menjadi lebih terbatas daripada sebelumnya, sekurang-kurangnya secara teoritis, dalam suatu sistem yang jauh lebih kecil. Bagaimanapun juga, hakekat dari gagasan demokrasi, dan asal-usulnya, adalah untuk mencegah hilangnya harapan bahwa batas-batas itu akan dapat dilampaui dengan menciptakan bentuk dan lembaga demokrasi yang baru. Hal semacam ini akan selalu memunculkan arus bawah yang kuat, yang memperjuangkan idealisme suatu negara demokrasi yang sepenuhnya partisipatif, oleh kalangan pendukung demokrasi, sebagaimana tergambar dalam buku Rousseau, *Social Contract* (Husen dan Hidayat, 1989).

Meskipun di negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung atau merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan yang harus menjamin terselenggaranya pemerintah yang demokratis sebagaimana persyaratan *Rule of Law*, tetapi prakteknya hal itu bukanlah suatu jaminan akan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Banyak tantangan dan kendala yang akan dihadapi, antara lain perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan banyaknya eksesekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, dan tersebarnya faham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata (Budiardjo, 2008).

Salah satu ciri yang dapat digunakan untuk menilai pemerintahan yang demokratis adalah adanya partisipasi politik atau keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Pada zaman dahulu, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, untuk memberikan suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi hanya untuk sekelompok orang yang berkuasa, kaya, dan keturunan terpandang. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik pun muncul, dimulai pada masa *Renaissance* dan Reformasi abad ke-15, yang kemudian terus berlanjut hingga ke-19. Dalam perkembangan itu, cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik menjadi berbeda-beda di berbagai Negara. Myron Weiner (dalam Mas'ood dan MacAndrews, 2011)

menyebutkan, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik. Kelima hal tersebut adalah:

1. Modernisasi
2. Perubahan-perubahan struktural kelas sosial
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, dan
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Fenomena bentuk partisipasi dalam perkembangannya di berbagai negara mulai menemukan bentuknya sendiri-sendiri. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik tersebut, dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warganegara.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
Pemberian suara Diskusi politik Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Pengajuan petisi Berdemonstrasi Konfrontasi Mogok Tindakan kekerasan politik terhadap benda-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik pada Tabel 1, pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini, partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara terdapat hampir di semua sistem politik, baik yang demokratis maupun otoriter. Pemilihan umum dalam negara-negara otoriter dan berpartai tunggal lebih merupakan alat bagi penguasa daripada alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara-negara berpartai tunggal tidak dimaksud untuk memberikan kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elite yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat.

Jadi, pemberian suara itu merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elite yang berkuasa. Penolakan untuk ikut memberikan suara dapat dianggap sebagai pernyataan protes secara diam-diam. Meskipun pemberian suara merupakan bentuk aktivitas politik yang paling umum di hampir semua sistem politik, bentuk-bentuk partisipasi lain (seperti: diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif) juga dijalankan oleh sejumlah kecil warganegara dalam sistem politik otoriter maupun demokratis, dan dalam hampir semua kebudayaan politik.

Uraian di atas menggambarkan bahwa apapun sistem politik suatu negara, maka semua bentuk partisipasi politik bisa saja terjadi. Easton menggambarkan bahwa sistem politik adalah sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Secara otoritatif berarti membuat konsep sistem politik langsung berhubungan dengan negara, dimana konteksnya tidak lepas dari pengaruh terhadap lingkungan psikologis dan situasional. Namun secara spesifik, Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik di dalam kehidupan masyarakat berhubungan dengan sistem politik. Hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk kegiatan politik mengikuti konsep kepentingan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya meliputi kegiatan-kegiatan politik yang bersifat mendukung dan menggugat atau menuntut, sebagai input yang diajukan masyarakat terhadap sistem politiknya.

Dengan demikian salah satu tonggak utama yang sangat mendukung sistem politik adalah sistem demokrasi yang dengan sistem itu, masyarakat dapat berpartisipasi terhadap ruang lingkup sistem politik. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampeng pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

- **Konsep Partisipasi Politik**

Budiardjo, McClosky, dan Huntington and Nelson, memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2013). Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan konsep partisipasi politik, namun secara umum semua sarjana bersepakat bahwa partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan warga negara untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah (Yusof, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, tindakan atau kegiatan yang diambil dapat berupa ikut serta dalam pemilihan umum ataupun tidak. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan politik tersebut, antara lain akibat adanya perbedaan perilaku dalam pemilihan umum. Setidaknya terdapat tiga aliran pemikiran yang berbeda dalam memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum, yaitu: (1) pendekatan sosiologis; (2) pendekatan psikososial/psikologis; dan (3) pendekatan (atau teori) pilihan rasional.

Kajian Lazarsfeld et.al pada tahun 1944 yang kemudian dikenal sebagai aliran Columbia (*Columbia School*) adalah penelitian pertama yang mendukung pendekatan sosiologikal. Mereka berpendapat bahwa perilaku mayoritas pemilih dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosioekonomi, agama, dan tempat di mana mereka tinggal. Hipotesis awal aliran ini menyatakan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor personal dan *kemelekan* mereka terhadap media. Tetapi, hasil studi ini juga menunjukkan adanya situasi yang bertentangan dengan hipotesis mereka di mana media memainkan peranan yang minimal dalam mempengaruhi keputusan individu. Terdapat fakta sebaliknya, yaitu keputusan tersebut banyak dipengaruhi oleh kelompok sosial. Maknanya, bahwa pemilih akan memilih partai atau pemimpin bukan karena isu yang diketengahkan dalam kampanye pemilihan umum, tetapi disebabkan oleh pengaruh ataupun tekanan lingkungan. Lazarsfeld et.al., merumuskannya sebagai berikut: “*People vote not only their social group, but also for it*” (Berelson, 1968).

Studi aliran Columbia dikembangkan lagi pada tahun 1954 oleh Berelson, Lazarsfeld dan McPhee dalam kajian mereka yang berjudul: *Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign*. Kajian ini memaparkan hasil yang sama seperti kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor-faktor sosial seperti agama, etnik, dan status sosio-ekonomi adalah faktor dominan dalam menentukan perilaku pemilih. Aliran ini diteruskan oleh Lipset (1960) dan Rokkan dan Lipset (1967). Kajian mereka memfokuskan perhatian pada perkembangan system kepartaian di dataran Eropa. Mereka menganalisis bahwa *political cleavage* yang berdasar prinsip sosiologi telah lama berakar dalam masyarakat Eropa. Misalnya, pembagian antara kota dan desa, buruh dan majikan, serta agama dan politik, menyebabkan lahirnya partai politik yang berasaskan pembagian social tersebut. Pembagian ini disebabkan oleh perbedaan yang amat ketara dalam kelompok social sehingga menyebabkan *cleavage* ini terinstitusionalisasi dalam system politik. Sehubungan dengan itu, *political cleavage* yang telah diinstitusionalisasikan mendorong warga untuk berinteraksi, mempunyai kesadaran dan sentimen sosial yang mempengaruhi perilaku politik mereka dalam pemilihan umum.

Kendati aliran Columbia berhasil menjawab pertanyaan faktor utama penggerak perilaku pemilih, tetapi beberapa sarjana seperti Wright (1977), dan Glasgow dan Alvarez (2005) melihat

kelemahan di balik kelebihan tersebut. Mereka menyatakan bahwa perilaku pemilih tidak hanya dapat dipahami melalui perspektif sosiologikal semata, sebaliknya perilaku juga dapat dipahami melalui peranan media, manifesto partai politik, struktur ekonomi sebuah Negara serta hubungan yang kuat di antara pemilih dan partai politik.

Michigan mencoba mengisi kekurangan aliran pemikiran Columbia dengan mengutarakan model psikososial/psikologis atau pendekatan identifikasi partai. Ide utamanya adalah tentang *partisanship* (keberpihakan). *Partisanship* merujuk kepada komitmen tinggi atas partainya yang ditunjukkan dengan kesetiaan dan dukungan penuh. Campbell et.al. (1960) menggambarkan *partisanship* sebagai: “*A perceptual filter through which the voters appreciate that which is unfavorable to the orientation of his party and ignore or devalue that which is unfavorable*”. Ini berarti pemilih mengidentifikasi diri mereka dengan partai politik tertentu dan hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Perubahan dalam sebuah partai dari segi kampanye, manifesto, atau calon yang bertanding, tidak memberi kesan apapun kepada anggota yang memiliki *partisanship* kuat. Campbell et.al. menyatakan bahwa: “... *once establish is an attachment which is not easily changed*”.

Pendekatan ini tidak menolak pengaruh kelompok sosial yang bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Malah, mereka melihat kelompok sosial sebagai roda penggerak *partisanship* untuk lebih komit terhadap partai demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi partai muncul sebagai sebuah barometer atau penentu terbaik untuk melihat pilihan pemilih. Aliran Michigan ini juga turut mengembangkan ide *funnel of causality*. Konsep ini adalah sebuah metafora yang digunakan untuk mengaitkan faktor-faktor internal (sosioekonomi, nilai, tingkah laku, dan psikologikal), eksternal (isu, calon, kampanye pemilihan umum, situasi politik dan ekonomi serta pengaruh masyarakat) dengan *partisanship* itu sendiri.

Meskipun identifikasi partai membantu kesetiaan yang langgeng, tetapi bukan berarti seseorang tidak bisa beralih ke partai lain. Verba, et.al. (1995) menyatakan bahwa: “Perubahan dalam identifikasi partai terjadi disebabkan oleh faktor-faktor pribadi dan faktor social seperti perkawinan, pekerjaan, dan perpindahan tempat tinggal”. Dalam hal ini, Campbell et.al., menyatakan bahwa:

Perubahan besar dalam masyarakat dan kebijakan baru yang diperkenalkan oleh partai turut mengubah identifikasi partai seseorang. Sebagai contoh, kebijakan The New Deal yang diintroduksi oleh Partai Demokrat berhasil mengalihkan sokongan masyarakat khususnya golongan muda, orang miskin dan minoritas kepada partai ini.

Pendekatan psikologis dikritik hebat oleh Dalton, Flanagan dan Beck (1984). Mereka menyatakan bahwa ikatan kesetiaan terhadap partai politik adalah sesuatu isu yang rumit karena melibatkan emosi yang bisa menyebabkan seseorang memilih partai lain atau menarik diri dari pemilihan umum. Bahkan dalam kajian klasik Goldberg (1969) dan Butler dan Stokes (1969) dijelaskan bahwa ikatan kesetiaan individu kepada partai politik didorong kepentingan pemilih, artinya partai yang bisa memenuhi keperluan pemilih baik dalam jangka pendek atau panjang, menjadi dasar dukungan pemilih kepada partai tersebut. Karena penjelasan mengenai perubahan pilihan pemilih masih tidak lengkap, maka lahirlah satu pendekatan baru yang dinamakan pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan pilihan rasional meletakkan logika berpikir pada pendekatan ekonomi yang dianjurkan oleh Downs. Asumsi utama teori ini amat mudah. Jika pilihan rasional bisa menjelaskan mekanisme pasar, maka teori ini tentunya mampu menjelaskan pertukaran suara dalam politik. Dalam konteks tersebut, Downs mengatakan bahwa:

Our main thesis is that parties in democratic politics are analogous to entrepreneurs in a profit-seeking economy. So as, to attain their private ends, they formulate whatever policies they believe will gain the most votes, just as entrepreneurs produce whatever products they believe will gain the most profits for the same reason. In order to examine the implications of this thesis, we have to assumed that citizens behave rationally in politics. This premise is itself a second major hypothesis.

Proses pemilihan di atas dilihat sebagai lembaga pertukaran antara pemilih dan partai politik untuk saling mencapai keuntungan masing-masing. Di satu sisi, pemilih menggunakan suaranya untuk memaksimalkan manfaat yang ingin diperolehnya, sedangkan di sisi partai politik bahwa mereka akan memformulasikan kebijakan dan program propemilih agar meraih suara dalam pemilihan umum. Argumen utama yang mendasari teori pilihan rasional adalah konsep (pertukaran yang) rasional (rasionalitas).

Meskipun demikian, pendekatan pilihan rasional yang menjelaskan tentang perilaku pemilih mengundang pelbagai kritik dari sarjana politik seperti Green dan Shapiro, dan Blais. Green dan Shapiro (1994) menjelaskan kelemahan utama pendekatan pilihan rasional pada metodologi yang digunakan. Pendekatan ini dikatakan gagal memaparkan bukti empiric yang mendukung argumen-argumennya. Misalnya, teori ini mempunyai pendekatan pemahaman yang sedikit dan terbatas mengenai interaksi politik dalam perilaku memilih. Sedangkan Blais (2000) mengkritik pendekatan teori pilihan rasional karena tidak berhasil menjelaskan perilaku pemilih secara utuh dan real. Ini karena kebanyakan pemilih memilih dalam pemilihan umum bukan karena faktor biaya atau keuntungan semata, tetapi atas dasar kesadaran terhadap tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat.

Konsep partisipasi politik dan perilaku pemilih dapat dikatakan saling berkaitan satu sama lainnya. Kajian Phelps (2005) menunjukkan bahwa faktor terjadinya penurunan yang signifikan di Inggris pada pemilihan umum tahun 1997 hingga tahun 2005. Hal ini disebabkan karena pemilih tidak memercayai suara mereka dalam pemilihan umum dapat membawa perubahan besar dalam system politik. Aspek sosioekonomi, struktur kelas, serta identifikasi partai tidak menjadi asas pertimbangan para pemilih karena mereka memilih berdasar pilihan rasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka bila muncul fenomena turunnya partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum, maka ini bisa dinyatakan tidak bermakna bahwa tahap partisipasi politik masyarakat tersebut rendah. Tetapi ia menunjukkan wujud dimensi baru dalam aktivitas dan tindakan politik kaum muda. Golongan muda dilihat mau menjalin hubungan dengan pemerintah dengan cara-cara baru yang lebih efektif. Cara dan gaya baru tersebut bertujuan agar himbuan dan suara mereka didengar oleh pemerintah secara reponsif, pada saat yang sama aktivitas-aktivitas mereka turut meningkatkan tekanan kepada elit politik.

Fenomena ini pernah terjadi di Korea. Selama beberapa tahun kelompok muda Korea terpinggirkan dari dunia politik sehingga tingkat partisipasi mereka dalam politik amat rendah. Dua alasan mengapa partisipasi mereka rendah adalah wujud dari kepercayaan yang kuat terhadap ajaran Confucius dan galaknya pemerintahan otoritarian Korea selama lebih satu perempat abad sehingga menyebabkan *depoliticization*. Bagaimanapun, protes '*The 2008 Candle Light*' dilihat sebagai *turning point* yang mengubah corak partisipasi politik kelompok muda Korea dari *depoliticized* ke partisipasi aktif. Pada masa itu, mata dunia tertuju pada partisipasi kelompok muda Korea pada skala besar dalam rangka memperjuangkan hak dan keadilan sosial. Perubahan ini adalah berawal dari kebangkitan media-baru yang menjadi saluran baru dalam berpolitik.

Uraian di atas menunjukkan adanya wujud hubungan antara partisipasi politik warga masyarakat (baik muda-tua, desa-kota, dan lain-lain) dalam pemilihan umum. Sedangkan hubungan antara konsep partisipasi politik dan teori perilaku pemilih adalah adanya entitas yang saling mengisi dan wujud hubungan saling timbal balik secara positif. Di sini, tahap partisipasi politik sebuah Negara dapat diukur dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh warganegara untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan pemerintah. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah memilih dalam pemilihan umum.

Memilih merupakan salah satu tindakan yang penting untuk melihat partisipasi politik warga karena ia merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat. Kecenderungan warga untuk turut serta dalam Pemilu menunjukkan wujudnya kesadaran politik dan nilai demokratik. Verba, Nie dan Kim (1972) menyatakan: "*The voting act is on individual act. And voting differs from other political act in that it requires relatively little initiative*". Jadi, konsep perilaku pemilih bisa digunakan sebagai indikator penilai tahap partisipasi politik.

- **Pilihan Rasional Pemilih Muda**

Dinamika politik nasional menuju Pemilu 2024 semakin ramai, seiring dengan aksi-reaksi yang terjadi di antara kekuatan yang akan memasuki gelanggang pertarungan. Partai politik kini harus mengayuh di antara harapan publik yang tecermin dari opini publik yang berkembang, kepentingan partai lain, dan tentunya kepentingan politik mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, politik yang tadinya sangat acak mulai membentuk pola yang harus dibaca secara cermat oleh elite partai.

Jika melihat tren belakangan, berbagai survei opini publik oleh sejumlah lembaga survei (antara lain Litbang Kompas, Indikator Politik Nasional, Lembaga Survei Jakarta, *Saiful Mujani Research and Consulting*, Poligov, *Political Weather Station*, *Algoritma Research and Consulting*, Populi, Indopol, LSI Denny JA, *Indonesia Political Opinion*, Lembaga Survei Nasional, dan Indikator Politik Indonesia) menguatkan beberapa nama sebagai figur paling potensial sebagai calon presiden untuk masuk ke gelanggang pertarungan pada Pemilu 2024, antara lain Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiga nama itu kini selalu berada di urutan teratas meski dengan persentase yang bervariasi dan posisi urutan yang bersaing satu sama lain.

Menghadirkan capres/cawapres maupun calon anggota legislatif ke dalam kesadaran publik itu bukan perkara mudah. Tak cukup menggunakan pendekatan linear melalui beragam publisitas di media massa dan medsos. Para elite harus datang, menyapa warga, membangun interaksi, mendengarkan dengan kejernihan hati dan pikiran apa yang jadi keluh kesah mereka, serta memformulasikan masukan mereka menjadi suatu benang merah gagasan dan program yang patut diperjuangkan. Publik juga akan menangkap pancaran kejujuran, kehangatan, dan kesungguhan atau sebaliknya kepalsuan, kedangkalan, dan kepura-puraan. Di situlah konvergensi simbolik atau berbagi kesadaran bersama itu akan diuji (Heryanto, 2023).

Terdapat beberapa kajian ilmiah terkait kepemimpinan masa depan Indonesia. Diantaranya adalah pemimpin masa depan harus mampu menggerakkan dunia kerja, dunia kreativitas, dunia inovasi, jiwa entrepreneurship, dan memengaruhi pasar dan industri global (Peramesti dan Kusmana, 2018). Kemudian, gaya kepemimpinan yang disukai oleh para milenial lebih banyak mengarah ke kepemimpinan yang sifatnya merakyat dan demokrasi (Premelani dan Widyastuti, 2021). Pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu melihat akar permasalahan bangsa, menawarkan solusi alternatif, dan memiliki pandangan global, demokratis, serta menghargai keragaman dengan menghindari pilihan tindakan radikal atau konflik (Tanti, 2012).

Selanjutnya, terdapat pula kajian tentang kelompok milenial. Diantaraya, generasi millennial merupakan generasi modern yang aktif bekerja, penelitian, dan berpikir inovatif tentang organisasi, memiliki rasa optimisme dan kemauan untuk bekerja dengan kompetitif, terbuka, dan fleksibel. Generasi ini dapat menjadi sebuah motor penggerak untuk mewujudkan pembangunan dalam masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan modernisasi. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin perlu untuk menyesuaikan dengan generasi yang mereka pimpin (Bhagawanta, 2019).

Berdasarkan rumusan ini, ada beberapa karakter dan tipe pemimpin masa depan yang lebih diminati oleh generasi milenial. Diantaranya adalah pemimpin milenial harus memiliki sepuluh karakter, di antaranya: jujur, kompeten, berpandangan ke depan, menginspirasi, cerdas, adil (*fairness*), berwawasan luas, berani, lugas, dan imajinatif (Sujai dan Rohim, 2021). Juga, ada empat prototipe utama kepemimpinan yang diharapkan oleh generasi milenial, yaitu bermoral, umumnya kompeten, karismatik, dan teliti. Prototipe pemimpin yaitu bermoral (41,07%), berkompeten (29,42%), karismatik (20,79%), teliti (8,71%) (A'yuninnisa et.al., 2020).

Sementara itu, anak muda Jakarta dan sekitarnya masih sadar akan kepedulian terhadap orang miskin dan orang-orang terpinggirkan di sekitar wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah harus mengakomodir hal tersebut dengan berbagai acara dan program yang terkait dan menarik antara lain melalui kewirausahaan sosial. Dukungan untuk orang cacat, tua orang, wanita, anak-anak harus dimasukkan dalam setiap bidang kehidupan bahkan di kota itu sendiri (Tarigan, 2014).

Sementara itu, penelitian Larasati, et.al., (2023) menyebutkan bahwa karakteristik untuk calon pemimpin yang berpotensi mendapat rekomendasi dari partai politik pada pemilu 2024 di Indonesia mirip dengan pemimpin terpilih yang diusung oleh partai politik pada 2019, baik dari segi profesi maupun status sosialnya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa standar pemimpin ideal

dalam politik dan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh popularitas profesional dan status sosial. Perlunya pemahaman yang lebih baik tentang kualitas dan atribut yang menjadikan seorang pemimpin yang baik, di luar popularitas dan status sosial.

Di samping itu, ada tujuh karakteristik unik pemimpin Indonesia di pemerintahan daerah. Pertama, sebagian besar individu paruh baya. Kedua, kebanyakan pria. Ketiga, agama dan tempat lahir merupakan faktor esensial dari elektabilitas kepala daerah. Keempat, kebanyakan dari mereka sangat tinggi berpendidikan. Kelima, banyak dari mereka berasal dari pejabat pemerintah. Enam, mereka aktif mengikuti berbagai organisasi. Ketujuh, mereka juga sangat berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Karakteristik pemimpin Indonesia dapat saling terkait satu sama lain. Pemimpin Indonesia tidak hanya berpendidikan tinggi tetapi juga berpartisipasi aktif berbagai organisasi dan memiliki pengalaman yang luas dalam peran kepemimpinan dan sektor pemerintah terkait lainnya (Angkawibawa dan Rezki, 2023).

Satu faktor penting yang perlu dipahami oleh kelompok pemilih muda adalah melihat tidak semata memiliki nilai dan daya ikat emosional, seperti bicara tentang sisi personal figur capres/cawapres, tetapi juga nilai fungsional yakni terkait gagasan dan kemampuan dalam mengatasi ragam persoalan dalam dan luar negeri untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Setiawan, 2018). Faktor-faktor ini menjadi alasan bagi kandidat baik capres/cawapres maupun partai politik untuk layak dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi bangsa. Karena itu, pemilih muda selain harus mampu membedakan berita palsu (*fake news* atau *hoaks*) dan berita benar, juga fenomena *unfriend* dan debat di media yang berujung ujaran kebencian dan fitnah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah saatnya dihentikan.

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Namun perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak boleh membuat perpecahan di Indonesia. Teladan *The Founding Fathers* Indonesia pada masa awal pergerakan nasional penting untuk diikuti. Mereka adalah golongan terpelajar yang tercerahkan, menjadikan perbedaan yang ada sebagai kekuatan yang hebat dan mereka berhasil. Untuk itu pemilih muda sepatutnya mampu dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu selanjutnya, serta mampu membuktikan perannya menyukseskan periode bonus demografi tahun 2045.

Pemilih muda harus mampu menilai seorang kontestan dari kacamata “*policy-problem solving*”, yaitu sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada, juga memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Meneladani Mohammad Hatta, bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan demokrasi tidak hanya memilih *figure* yang terbaik, yaitu tidak semata memiliki nilai dan daya ikat emosional (seperti sisi personal figur seorang pemimpin). Tetapi, demokrasi juga melihat nilai fungsional, yakni terkait gagasan dan kemampuan dalam mengatasi ragam persoalan dalam dan luar negeri.

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilu dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran politik atau masih terjaganya tingkat kepercayaan (kepedulian) pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung. Pemilih muda saat ini lebih rasional dan kritis tentang pemimpin masa depan Indonesia. Kemampuan pemilih muda untuk beradaptasi dengan modernisasi membutuhkan pemimpin yang dapat menyesuaikan dengan generasinya.

Kesadaran politik pemilih muda perlu dijaga bahkan ditingkatkan pada Pemilu 2024 dengan cara antara lain mengakomodasi tuntutan pemilih diberikan hak bersuara secara LUBER dan JURDIL agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dapat bermakna serta memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Perlu adanya upaya program paradigmatis, lebih kreatif dan produktif dari para penyelenggara pemilu. Selain itu upaya sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta pemilihan lebih massif dalam melakukan pertukaran gagasan terkait visi dan misi program pembangunan, mengingat pemimpin masa depan Indonesia haruslah dapat menggunakan segala kekuatan dan mengatasi kelemahannya untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.

Upaya lainnya adalah mendesain strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih secara massif melalui tatap muka, penggunaan teknologi informasi dengan konten kreatif berbasis internet dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Research Gate, 5.
- A'yunnisa, Rizqi Nur'aini, Muhammad Fashih Hibatul Haqqi, Nisfi Balqish Rusli, Nabila Puteri. (2020). *Indonesian Implicit Leadership Theory: Typical and Positive Leadership Prototypes for Indonesian Millennials*, Asian Journal of Social Sciences and Management Studies Vol. 7 No. 1, 1-7.
- Angkawibawa, Albert Ludi, dan Jahen F. Rezki. (2023). *Leaders' Characteristics In Indonesia: What Does The Data Say?*, LPEM-FEBUI Working Paper-075 March.
- Bariguna et.al.(2021). Electoral Behavior in the Electability of Presidential and Vice Presidential Candidates in the 2019 Elections. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Benn, S.I., and R.S. Peters. (1964). Principles of Political Thought, New York: Collier Books.
- Budiardjo, Miriam. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Berelson, Lazarsfeld. (1968). Voting: A Study of Opinion in a Presidential Campaign, Chicago: Chicago University Press.
- Blains. (2000). A. To Vote or Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory. Pittsburg: University of Pittsburg.
- Bhagawanta, Javas Yola. Kepemimpinan Masa Kini: Komunitas Kepemudaan Bantul Bergerak, Menginspirasi Bumi Projtamansari, dalam Buku Pemuda dan Gaya Kepemimpinan di Era Milenial, Yogyakarta, UGM: Buana Grafika.
- Creswell, J.W., & J.D. Creswell. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Sage publications.
- Campbell, et.al. (1960). The American Voters, Chicago: University of Chicago.
- Codrington, Graeme & Sue Grant-Marshall. (2004). Mind the Gap, Penguin Books.
- Dahl, Robert A. (1992). Democracy and Its Critics. Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fukuyama, Francis. (1992). The End Of Historis And The Last Man, New York: Free Press.
- Gaffar, Afan. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Green, D.P., & I. Shapiro. (1994). Pathologies of Rational Choice Theory. New Haven: Yale University Press.
- Hendrik, Doni. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi.
- Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson. (1977). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Cambride, Mass: Harvard University Press.

-
- Heryanto, Gun Gun. (2024). Opini Publik Capres 2024, <https://www.uinjkt.ac.id/opini-publik-capres-2024/>.
- International Commission of Jurists. (1965). *The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age*, Bangkok: International Commission of Jurists.
- Kleden, Ignas. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai (Pemilu 2004: Seberapa Langsung Pemilihan Langsung)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian PPN / Bappenas. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. 2019.
- Larasati, Yuniar Galuh, Henky Fernando, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Muhammad Rifai Darus and Suparto Iribaram. (2023). Past Preferences Informing Future Leaders For Indonesian 2024 General Elections, *Cogent Social Sciences* (2023), 9.
- Lipson, Leslie. (1964). *The Democratic Civilization*, New York: Ferrer and Simons Inc.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews, (2011). *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- McClosky, Herbert. (1972). *Political Participation*, International Encyclopedia of the Social Sciences, edisi ke-2, New York: The Macmillan Company, XII.
- Phelps, E. Young Voters at The 2005 British General Election. *The Political Quarterly* 76 (4), 2005.
- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia & Dedi Kusmana. (2018). Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial, *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, IPDN\Vol. 10 No. 1\Maret.
- Pramelani dan Tri Widyastuti, (2021). Millennials' Perceptions of The Leadership Style of Indonesian Presidential Candidates in 2024, *Nahkoda: JIP*, Vol. 20 No. 2.
- Rousseau, Jean-Jaques. (1989). *Du Contrat Social*. Terjemahan Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Jakarta: Dian Rakyat.
- Raden, Sahran, Intam Kurnia, Randi Atma R. Massi. (1999). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*, Yogyakarta: KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bekerjasama dengan Cakrawala Yogyakarta.
- Sujai, Akhmad, Abd. Rohim H.S, Amrullah, Ishak Abdulhak, Achmad Mudrikah. (2021). Kepemimpinan Masa Depan (Future Leadership) Dalam Perspektif Agama, Filosofi, Psikologi dan Sosiologi; Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan, *Islamika, Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan, Heru Dian. (2018). *Kepemimpinan Sektor Publik*, Jakarta: Universitas Nasional.
- Tarigan, Nuah Perdamenta. (2014). Effective Nation Characters Leaders In Connection With Inclusive Design For Preparing The Visionary And Effective Of Youth Leaders For Urban Society, *Jurnal Humaniora* Vol.5 No.2 Oktober.
- Tanti, Dewi Sad. (2012). Potret Kepemimpinan Politik Masa Depan Dalam Media Massa, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*.

Verba, S. et.al. (1995). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*, New York: Harper & Row, p.78.

Verba, S., & NH. Nie. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.

Yusof, Mohammad Agus. (2012). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih: Sebuah Refleksi Teoritikal*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Universitas Nasional, Vol. 8/No.16.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>; <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11547/dps-pemilu-2024-205-juta-pemilih>;

<https://news.republika.co.id/berita/rpvb7k409/kpu-pemilu-2024-didominasi-pemilih-muda-berusia-1740-tahun>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>

<https://www.youtube.com/watch?v=6965Meuylik&t=10s>

<https://www.kompas.tv/nasional/387718/csis-ada-114-juta-pemilih-muda-di-pemilu-2024-masuk-partai-politik-cuma-1-1-persen>.

<https://kumparan.com/kumparannews/caleg-milenial-dan-gen-z-bertebaran-di-pemilu-2024-apa-yang-mereka-tawarkan-20aSrOzUz8Y/3>
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/15462151/anggota-dpr-terpilih-terdiri-dari-5026-persen-wajah-lama-8052-persen-laki>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221111152527-4-387147/ngeri-4-masalah-di-masa-depan-ini-bikin-sri-mulyani-takut>